
Kemiskinan, Kesenjangan dan PDRB Perkapita di Sulawesi Selatan

A. Gustang

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh kemiskinan dan kesenjangan terhadap PDRB perkapita. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory. Populasi penelitian adalah kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu; jumlah penduduk miskin, gini rasio dan PDRB perkapita menurut lapangan usaha dan harga konstan berupa dokumen terpublikasi. Sampel yang digunakan sebanyak 105 dalam bentuk panel data terdiri dari 21 kabupaten dan kota (data crossection) dengan menggunakan data dokumentasi tahun 2015-2019 (data time series). Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan uji statistik regresi data panel dengan menggunakan olah data program eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan dapat meningkatkan PDRB perkapita. Implikasi hasil penelitian dengan menggunakan model menurunkan angka kemiskinan, dan rasio kesenjangan menghasilkan peningkatan PDRB perkapita secara langsung dan tidak langsung yang berkualitas. Implikasi tersebut bisa tercapai dengan mendorong penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kesenjangan, PDRB perkapita

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sering disamakan dengan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan dasar mengukur keberhasilan ekonomi suatu negara atau wilayah, namun menyisakan persoalan yang terkadang disepelekan. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi mestinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, kesenjangan makin melebar, distribusi pendapatan tidak merata dan masih terjadi defisit anggaran. Seperti di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan PDRB yaitu sebesar 7,23% lebih tinggi dari pertumbuhan tingkat nasional, namun jumlah penduduk miskin bertambah dari 807.000 orang menjadi 813.100 orang pada tahun 2017. Todaro menyatakan masalah dasar pembangunan bukan pada bagaimana menumbuhkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), tetapi yang menjadi masalah mendasar adalah siapa yang terlibat dalam menciptakan pertumbuhan tersebut (Todaro, 2014).

Menurut Ragnare Nurkse bahwa negara terbelakang pada umumnya terjat ke dalam apa yang disebut *"the vicious circle of poverty"* atau "lingkaran setan kemiskinan". Membicarakan masalah pembangunan ekonomi, konstelasi yang kuat ada pada lingkaran yang menyebabkan negara miskin tetap berada dalam kemiskinan. Pendapatan riil rendah merupakan cerminan dari rendahnya produktivitas, yang penyebab utamanya menurut Nurkse adalah kurangnya modal. Kurangnya modal adalah hasil dari kapasitas kecil untuk menyimpan (*the small capacity to save*), sehingga sempurnalah lingkaran kemiskinan ini dari sisi pasokan modal (*the supply of capital*) (Mudrajat Kuncoro, 2010).

Begitu juga M. L. Jingham mengungkapkan hambatan pembangunan ekonomi yaitu: (1) lingkaran setan kemiskinan, (2) Tingkat pembentukan modal yang rendah, (3) hambatan sosio-budaya, (4) dampak kekuatan internasional (M.L. Jingham, 2014).

Istiqamah mengungkapkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data deret waktu (*time series*) tahun 2010-2016 dan data deret lintang (*cross section*) 34 provinsi di Indonesia (Istiqamah, 2018). Miftahurrahmah menemukan bahwa PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2011-2017 (Miftahurrahmah, 2019).

Hasil penelitian OECD bahwa ketika ketimpangan pendapatan meningkat pertumbuhan ekonomi akan jatuh dengan memasukkan variabel pendidikan sebagai bagian dari faktor penyebab ketimpangan (OECD, 2014). Federico Cingano mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap

pertumbuhan berkelanjutan dengan studi kasus pada negara-negara OECD selama 30 tahun (Federico Cingano, 2014).

Begitu juga dengan hasil studi SMERU terkait tantangan kebijakan pengendalian ketimpangan di desa adalah sebagian besar indikator pembangunan ekonomi dan sosial berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Tingkat kesejahteraan yang makin tinggi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat yang tinggi sebagai indikator pembangunan ekonomi secara signifikan berkorelasi dengan ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan yang tinggi justru terjadi di desa-desa yang lebih maju secara ekonomi, hal ini diakibatkan oleh ketimpangan akses terhadap kesempatan antara kelompok miskin dan kaya di desa (Nila Warda dkk, 2019).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan ada dua pradigma dalam persoalan pendapatan perkapita, kemiskinan dan kesenjangan. Pradigma pertama, penurunan angka kemiskinan dan tingkat rasio kesenjangan dengan mendorong peningkatan pendapatan perkapita. Pradigma kedua, penurunan angka kemiskinan dan tingkat rasio kesenjangan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita. Pertumbuhan pendapatan perkapita dengan menggunakan pradigma yang kedua dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas. Pertumbuhan yang dihasilkan dengan menurunkan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan memberi indikasi bahwa hasil pembangunan di nikmati secara merata. Sementara, penurunan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan perkapita besar kemungkinan itu hanya penurunan semu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam pembangunan ekonomi daerah secara umum adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan penurunan angka kemiskinan, distribusi pendapatan yang belum merata dan menimbulkan kesenjangan, ketersediaan modal yang masih mengalami hambatan untuk sampai ke masyarakat miskin dengan alasan penguasaan akses dan kendala keyakinan. Sebab itu, masalah tersebut akan membentuk lingkaran masalah yang saling terkait satu sama lain yang membutuhkan penanganan secara komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di batasi sebagai berikut;

1. *Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap PDRB perkapita?*
2. *Apakah kesenjangan berpengaruh terhadap PDRB perkapita?*
3. *Apakah kemiskinan dan kesenjangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB perkapita?*

1.3. Hipotesis

1. *Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita.*
2. *Kesenjangan berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita.*
3. *Kemiskinan bersama kesenjangan berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita.*

1.4. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh kemiskinan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menguji secara empiris pengaruh kesenjangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menguji secara empiris pengaruh kemiskinan bersama kesenjangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Sulawesi Selatan.

II. Studi Literatur

2.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Michael P. Todaro bahwa segenap kekuatan ekonomi dan social yang melingkupi negara-negara berkembang baik internal maupun eksternal, harus sama-sama memikul tanggung jawab untuk mengatasi: kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya produktivitas. Karena itu, masalah yang dihadapi pembangunan ekonomi negara sedang berkembang adalah: kemiskinan, produktivitas yang rendah, pertumbuhan penduduk yang berlebihan, pengangguran, ketergantungan ekspor pada produk primer dan rapuhnya negara-negara berkembang di pentas internasional (Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, 2014).

Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam membangun sistem ekonomi alternatif-perspektif Islam mengungkap bahwa sistem ekonomi yang dipakai dunia saat ini, yaitu sistem ekonomi kapitalis, mempunyai tiga kelemahan. Pertama, orientasi kesejahteraan yang hanya berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Ini menyebabkan pemerataan, keadilan, dan kemanusiaan terabaikan. Sebaliknya, kesenjangan social kian menajam. Kedua, pengukuran nilai yang hanya berbasis harga dan materi. Kenikmatan hidup tidak diukur dari kebutuhan sebenarnya, tapi hanya dihitung dari harga materi. Ketiga, keyakinan yang mutlak pada harga sebagai penyelesaian distribusi dan produksi. Akibatnya, sikap tidak rasional dan tidak manusiawi, melambungnya harga-harga, dan kian parahnya kesenjangan (An-Nabhani, 2006).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Bannock, 2004).

Terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi: 1) Pembangunan sebagai suatu proses; 2) Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita; 3) Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Lincolin pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad Lincolin, 2011). Menurut Prof. Meyer, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Schumpeter, *economic development* adalah perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional dimana proses tersebut terjadi secara spontan dan tidak terputus-putus. Menurut Irawan, *economic development* adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Maxmanroe, 20190).

Pradigama baru dalam pembangunan dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an, dimana negara sedang berkemabang (NSB) mulai menyadari bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita, ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada khususnya di pedesaan dan daerah-daerah seperti masalah pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidak seimbangan structural. Pradigma baru dalam pembangunan berupa pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap lingkungan, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis, wanita dalam pembangunan, pembangunan regional/spasial, dan pembangunan masyarakat (Kuncoro, 2010).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses usaha menaikkan pendapatan riil per kapita yang dapat menyebabkan perubahan dalam bentuk peningkatan taraf hidup dalam waktu yang panjang. Sementara itu, masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi baik pradigma lama maupun baru pada umumnya hampir sama, yaitu; pengangguran, permasalahan pemupukan modal, kemiskinan, pendistribusian pendapatan, kesenjangan ekonomi, dan sumber-sumber pembiayaan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu negara dalam suatu periode

tertentu biasa digunakan data Gross Domestic Product (GDP), dan untuk wilayah atau daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu instrumen pokok dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah baik itu lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk menghitung angka-angka PDRB menurut BPS ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

a) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Bersih
- Konstruksi
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

- 2) pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) perubahan inventori, dan
- 5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto (BPS, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pengeluaran dengan harga konstan, karena itu lebih mendekati dan memudahkan melihat hubungannya dengan zakat.

2.3. Kemiskinan

Istilah yang paling banyak digunakan untuk menyebutkan kemiskinan di dalam Al-Qur'an adalah kata al-faqr dan al-maskanah. Pelakunya disebut faqir atau miskin. Dari segi etimologis, kata faqr menunjukkan pada hilangnya sesuatu pada bagian tertentu termasuk di antaranya patah tulang belakang. Jadi, orang yang faqir seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan. Juga bisa bermakna orang yang membutuhkan, kehinaan, menempel ke tanah, jatuh, dan kematian. Adapun kata miskin dibentuk dari fi'il madhi (kata kerja bentuk lampau) sakana yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak, bertempat tinggal, rendah dan hina. Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya (Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, 2016). Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, sementara fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan tidak terdapat keluarga yang dapat menafkahnya (Az-Zuhaili, 2011). Menurut Shirazi dan {Pramanik, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual (Syauqi Beik, Irfan, dkk., 2016). Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan ((BPS, 2019).

Ukuran kemiskinan: (1) Kemiskinan absolut konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap

makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (BPS, 2019); (2) Kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Untuk mengukur kemiskinan digunakan alat ukur kemiskinan yaitu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Yang paling umum digunakan adalah headcount index untuk menghitung jumlah penduduk miskin, *proverty gap* dan *income gap ratio* digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan, *sen index* dan *fgt (foster, greer and thorbecke) index* untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan.

2.4. Kesenjangan

Kesenjangan atau bisa juga disebut ketimpangan adalah jarak atau jurang antara yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Kesenjangan atau ketimpangan dalam hal ini adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antarwilayah atau negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan.

Kesenjangan ekonomi bervariasi tergantung masyarakat, waktu, struktur ekonomi, dan sistem. Istilah tersebut dapat mengacu pada persebaran pendapatan atau kekayaan lintas lapisan masyarakat pada waktu tertentu, atau pendapatan dan kekayaan seumur hidup dalam jangka panjang. Ada beberapa indeks numerik untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Di antara metode pengukuran kesenjangan yang ada yaitu koefisien gini untuk mengukur kesenjangan pendapatan regional dan indeks williansom untuk mengukur kesenjangan antarwilayah.

Salah satu alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan nasional dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Corrado Gini dengan hasil hitungan yang disebut Gini Concentration Ratio (GCR). Di Indonesia biasa disebut indeks Gini atau rasio Gini (G). Rasio Gini diukur dengan memanfaatkan kurva Lorenz yaitu membandingkan luas daerah ketimpangan aktual dengan luas daerah ketimpangan sempurna. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa $0 < GCR < 1$. Jika $GCR = 0$, berarti kurva Lorenz berimpit dengan egalitarian line yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan nasional adalah merata sempurna, dan jika $GCR = 1$ berarti bahwa kurva Lorenz berimpit dengan kurva siku atau menjauh dari egalitarian line yang menunjukkan bahwa distribusi yang timpang mutlak. Menurut Oshima, indeks Gini sebesar 0,3 menunjukkan ketimpangan ringan, 0,4 ketimpangan moderat atau sedang, dan 0,5 menunjukkan ketimpangan berat. Untuk menentukan kondisi distribusi pendapatan berdasarkan rasio gini telah disiapkan ukuran nilai koefisien dalam tabel berikut (Suherman Rosidi, 2017).

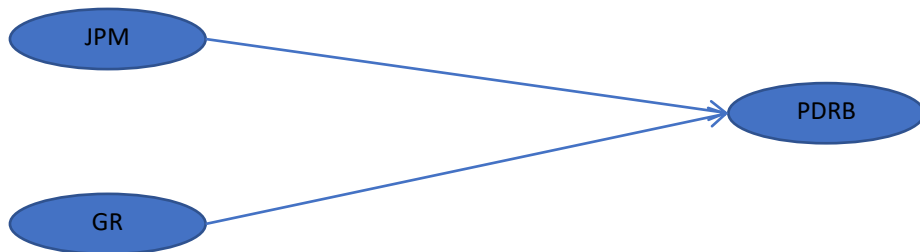
Tabel 1 Rasio Indeks Gini

Nilai Indeks Gini	Jenis ketimpangan
Sampai dengan 0,3	ringan
> 0,4 – 0,5	sedang
> 0,5	berat

III. Metode Penelitian

3.1. Kerangka Pemikiran

Konsep yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan pendapatan perkapita. Oleh karena itu, model tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka fikir sebagai berikut;



Gambar 2.2 Kerangka fikir

Keterangan:

JPM : Jumlah Penduduk Miskin (kemiskinan)

GR : Gini Ratio (kesenjangan)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita

Kerangka fikir tersebut menjelaskan bentuk hubungan dan jalur hubungan kemiskinan (JPM) dan kesenjangan (GR) dengan PDRB perkapita. Asumsi awal berdasarkan teori yang digunakan bahwa kemiskinan (JPM) dan kesenjangan (GR) berpengaruh terhadap PDRB perkapita.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan secara umum adalah metode penelitian kuantitatif dengan model hubungan asosiatif (eksplanatori) dan menggunakan data panel (gabungan data time series dan crosssection). Menurut Prof. Dr. Sugiono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel secara umum dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2009). Menurut W. Lawrence Neuman bahwa dalam studi kuantitatif menggunakan prinsip positivis dan menggunakan bahasa variabel dan hipotesis, sehingga yang menjadi penekanan dalam studi kuantitatif adalah mengukur variabel dan menguji hipotesis (W. Lawrence Neuman, 2014). Patricia Leavy bahwa penelitian kuantitatif ditandai dengan pendekatan deduktif terhadap proses penelitian yang bertujuan untuk membuktikan, menyangkal, atau mendukung teori yang ada.

Adapun lokasi penelitian yang kami pilih adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan selain kedekatan dengan lokasi, juga tersedianya data awal yang cukup terkait tema yang akan dikaji serta kondisi masyarakat yang mayoritas muslim yang cenderung homogen. Yaitu pada Provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih sekaligus sebagai sumber data.

3.2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma ilmu positivistik dengan pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi, dengan alat analisis menggunakan teori pembangunan ekonomi dari Todaro, teori penyelesaian problem lingkaran setan kemiskinan dari Nurkse. Menurut Crussell pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji obyektifitas teori dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel tersebut harus diberi nilai sesuai instrumen sehingga dapat diukur dan dianalisis menggunakan prosedur statistik serta bisa untuk menggeneralisasi dan mereplikasi temuan (Creswell, 2018). Menurut Patricia Leavy bahwa pendekatan kuantitatif sebagai pusat penelitian tentang pencapaian objektivitas, kontrol, dan pengukuran yang tepat. Secara metodologi, pendekatan ini bergantung pada desain deduktif yang ditujukan untuk menyangkal atau membangun bukti yang mendukung teori dan hipotesis tertentu. Pendekatan kuantitatif paling sering digunakan dalam penelitian eksplanatori untuk menyelidiki hubungan sebab akibat, asosiasi, dan korelasi (Patricia Leavy, 2017).

3.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten kota yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 kabupaten dan kota untuk populasi data *crosssection*, sementara populasi *datatime series*nya adalah semua waktu baik itu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sementara sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik non-random sampling dengan cara *proportional sampling* yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Maka sampel yang digunakan adalah kota dan kabupaten yang memiliki data kemiskinan, Kesenjangan dan PDRB perkapita. Adapun jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 105, yaitu sampel *crosssection* sebanyak 21 sampel dan sampel *time series* kami gunakan data tahunan sebanyak 5 tahun (2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019).

3.2.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kuantitatif digunakan tehnik pengumpulan data kuantitatif dengan dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Untuk pengumpulan data kuantitatif kami gunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan dokumentasi. Dimana data yang sesuai dengan variabel di ambil dari data-data yang sudah tedokumentasi dari badan pusat statistik (BPS). Pengumpulan data kuantitatif kami gunakan data sekunder berupa dokumentasi dari laporan BPS.

3.2.5. Instrumen Penelitian

Instrumennya adalah data publikasi oleh kantor yang kompeten dan alat analisis data yang digunakan adalah statistik dengan *software eviws*. Instrumen penelitian ini juga dinyatakan dalam model persamaan statisitik. Adapun model yang digunakan untuk persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, sebagai berikut;

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} = variabel devenden (variabel terikat)
- X_{nit} = variabel indevenden (variabel bebas)
- I = entitas ke-i
- t = periode ke-t
- α = konstanta

β = koefisien regresi

ϵ_{it} = variabel diluar model (Widarjono, 2007)

3.2.6. Validasi dan Reliabilitasi Intrumen

Untuk uji validitas dan realibitaas instrumen digunakan alat uji asumsi klasik yaitu;

1. Uji normalitas, Merupakan alat uji untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera karena lebih muda dengan evIEWS.
2. Uji multikolinearitas, Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model yang terpilih terdapat interkorelasi antar variabel indeviden. Uji multikoloniaritas dilihat dari nilai toleransi tolerance dan variance inflation factor (VIF) (Niken Naninncova, 2019).
3. Uji heteroskedastisitas, Uji ini bertujuan untuk mendeteksi model regresi yang terpilih terjadinya ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini untuk uji heteroskedastisitas kami gunakan uji glesjer.
4. Uji autokolerasi, Merupakan alat uji untuk mengetahui tingkat korelasi (hubungan) yang terjadi antar entitas dan waktu dalam satu variabel. Dalam penelitian ini untuk uji autokorelasi kami hanya menggunakan uji Durbin-Watson.

3.2.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum melakukan olah data maka langka yang pertama harus dilakukan adalah menetapkan variabel yang ada kemudian bentuk data yang akan digunakan untuk setiap variabel, yaitu:

Tabel 2 Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Satuan	Sumber
JPM	Kemiskinan berdasarkan Jumlah penduduk miskin	Orang	BPS, diolah
GR	Ketimpangan dengan menggunakan Rasio Indeks Gini	Ratio	BPS, diolah
PDRB	PDRB perkapita per kabupaten kota berdasarkan Lapangan Usaha dan Harga Konstan	Rupiah	BPS, diolah

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan sofwer EvIEWS 9, dengan lanagkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan model regresi; dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji Lanrange Multiplier.
- 2) Uji asumsi klasik;
- 3) Uji kelayakan model, dengan menggunakan uji koefisien determinand (R-Square) dan uji hipotesi (uji F dan uji t).
- 4) Interpretasi model.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Gambaran deskripsi data sampel dari variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.9, sebagai berikut:

Tabel 3 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi				
	Maksimum	Minimum	Mean	Median	Standar Deviasi
JPM	79.570	7.620	69.303	29.650	18.242,15
GR	0,482	0,279	0,370	0,369	0,035
PDRB	116.874.792,26	19.688.454,30	41.858.364,86	38.648.682,65	16.718.942,56

Sumber: Data diolah

a. Kemiskinan (JPM)

Variabel kemiskinan dengan menggunakan jumlah penduduk miskin sebagai ukuran menunjukkan nilai sampel yang paling tinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 79.570 orang. Nilai tersebut terdapat pada sampel Kabupaten Bone pada tahun 2018. Sementara nilai minimum sampel dari variabel kemiskinan yaitu 7.620, yang berarti bahwa nilai paling kecil dari sampel adalah 7.620 orang. Jumlah orang miskin tersebut terdapat pada sampel Kota Pare-Pare pada tahun 2019. Nilai tersebut sekaligus menggambarkan daerah yang memiliki jumlah orang miskin paling sedikit. Nilai rerata dari variabel kemiskinan yaitu sebanyak 69.302 orang. Artinya rata-rata jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 69.302 orang. Sementara nilai median menunjukkan nilai sebanyak 29.650, artinya 50% kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin kurang dari 29.650 dan 50% kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin lebih dari 29.650 orang. Sementara nilai standar deviasi menunjukkan angka 18.242,15, artinya rata-rata sampel mengalami penyimpangan dari rerata sampel sebesar 18.242 orang.

b. Kesenjangan (GR)

Variabel kesenjangan menunjukkan data sampel maksimum 0,482, artinya data sampel paling tinggi memiliki nilai 0,482. Angka maksimum tersebut terletak pada sampel Kabupaten Takalar pada tahun 2019. Data sampel paling kecil yaitu dengan nilai minimum 0,279, artinya

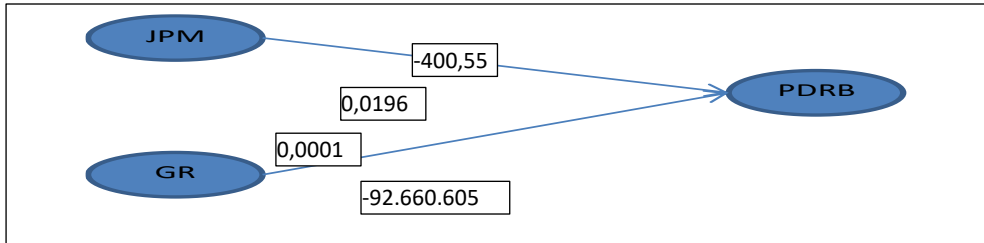
rasio kesenjangan terendah dari sampel adalah 0,279. Data dari sampel memiliki nilai rerata 0,370, artinya rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami tingkat kesenjangan pada rasio 0,370. Berarti rata-rata kondisi kesenjangan di Provinsi Sulawesi Selatan masih pada level sedang. Jika dilihat rentang antara nilai rerata dengan nilai maksimum dan minimum yang kecil menunjukkan bahwa data sampel berdistribusi normal. Hal tersebut juga di dukung oleh data median dengan angka 0,369, nilai tersebut hampir sama dengan nilai rerata. Begitu juga dengan nilai standar deviasi yang kecil dengan nilai 0,035, artinya penyimpangan data sampel terhadap rerata masih rendah.

c. Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRB)

Berdasarkan tabel deskripsi variabel pada tabel distribusi data sampel dari variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita diatas menunjukkan nilai maksimum Rp 116.874.792,26. Artinya PDRB perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir sebesar Rp 116.874.792,26, nilai tersebut terdapat pada sampel Kota Makassar data tahun 2019. Data sampel minimum dari variabel PDRB perkapita yaitu Rp 19.688.454,30, artinya PDRB perkapita terendah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp 19.688.454,30. Data sampel paling kecil tersebut terdapat pada sampel Kabupaten Jeneponto pada data tahun 2015. Artinya Kabupaten Jeneponto adalah Kabupaten dengan PDRB perkapita terendah selama tahun 2015-2019. Sementara nilai rerata variabel PDRB perkapita selama lima tahun yaitu Rp 41.858.364,86. Artinya PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015-2019 rata-rata Rp 41.858.364,86. Jika dibandingkan nilai rerata dengan nilai maksimum dan minimum data sampel dari variabel PDRB perkapita terlihat jarak yang cukup besar, artinya data sampel kemungkinan tidak berdistribusi normal. Hal tersebut didukung oleh nilai standar deviasi yang tinggi yaitu 16.718.942,56, artinya setiap sampel memiliki penyimpangan rata-rata dari rata-rata sampel sebesar 16.718.942,56.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini dalam pengujian hipotesis digunakan 3 (tiga) model, yang terdiri dari 1 common effect model (CEM), 4 fixed effect model (FEM) dan 4 random effect model (REM). Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F dan untuk uji hipotesis digunakan uji t. Model terpilih dapat diterima jika nilai probability (signifikansi) nilai F lebih kecil dari 0,05, berarti jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka model tertolak. Untuk uji hipotesis juga seperti itu jika nilai probability dari uji t lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, dan sebaliknya jika lebih besar maka hipotesisnya ditolak. Berdasarkan hasil uji F dengan menggunakan aplikasi eviews yang sudah dilakukan sebelumnya dengan rekapitulasi sebagai berikut. Untuk uji hipotesis kami rangkum dalam bentuk gambar skema dan tabel sebagai berikut;



Gambar Model Hubungan JPM, GR dan PDRB (Sumber; Diolah dari output Eviews)

Untuk uji hipotesis menggunakan uji t akan diuraikan berdasarkan hipotesis penelitian menunjukkan dari sembilan bentuk pengaruh langsung. Terdapat tujuh pengaruh langsung yang signifikan dan dua yang tidak signifikan. Kedua pengaruh yang tidak signifikan tersebut yaitu pengaruh terhadap kesenjangan (GR), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut;

Tabel Rekap Hasil Uji Hipotesis pengaruh langsung;

No.	Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabiliti	Bentuk Hubungan	Kesimpulan
1	Kemiskinan (JPM) ke Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB)	-400,55	-2,3795	0,0196	Negatif	Signifikan
2	Kesenjangan (GR) ke Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB)	-92660605	-4,127591	0,0001	Negatif	Signifikan

Sumber; Diolah dari Eviews

4.2.1. Pengaruh Kemiskinan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemiskinan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perkapita. Artinya, jika angka kemiskinan bertambah akan mengakibatkan menurunnya nilai Produk Domestik Regional Bruto Perkapita. Begitu juga sebaliknya jika angka kemiskinan berhasil diturunkan akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Hal tersebut sudah sejalan dengan teori yang ada bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perkapita.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan temuan AA Gede Krisna Pratama dan Ida Bagus Darsana yang mengungkapkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus di Provinsi Bali (AA Gede Krisna Pratama, Ida Bagus Darsana, 2019). Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa penurunan angka kemiskinan lebih utama dari pada pertumbuhan. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Todaro bahwa kemiskinan dan kesenjangan lebih utama diselesaikan baru kejar pertumbuhan. Untuk memperoleh pertumbuhan yang baik harus menyelesaikan dulu salah satu masalah utama pembangunan yaitu kemiskina setelah

kesenjangan. Begitu juga dengan apa yang diungkapkan oleh Moh. Arif Novriansyah bahwa pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus di Provinsi Gorontalo (Moh. Arif Novriansyah, 2018). Meski menambahkan pengangguran sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan mengurangi angka pengangguran dari orang miskin akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan juga dengan temuan Lonnie K Stevans dan David N. Sessions yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di akibatkan oleh penurunan tingkat kemiskinan untuk semua keluarga. Yang sebelumnya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan studi dampak ekspansi ekonomi tahun 1980-an di Amerika Serikat (Stevans dan David, 2015). Begitu juga dengan temuan Housseima Guida dan Jaleleddine Ben Rejeb bahwa investasi di sektor sosial dapat meningkatkan kehidupan penduduk miskin di pedesaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Guiga and Rejeb, 2012). Semakin sedikit keluarga miskin akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diawali dengan mengurangi angka kemiskinan yang ada.

4.2.2. Pengaruh Kesenjangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari model hubungan antara kesenjangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan. Berarti kesenjangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sehingga jika angka kesenjangan meningkat akan mengakibatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menurun, sebaliknya jika angka kesenjangan menurun akan mengakibatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita meningkat. Hal tersebut sudah sejalan dengan teori yang ada dimana kesenjangan memiliki pengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Hal tersebut sejalan dengan temuan Hadi Sasana yang mengungkapkan kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi memiliki hubungan dengan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi. Semakin lebar rasio kesenjangan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan ekonomi. Sehingga jika ingin meningkatkan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi maka harus terlebih dahulu mengusahakan penurunan rasio kesenjangan. Hal tersebut senada dengan apa yang diuraikan Todaro dalam buku economic development bahwa menyelesaikan persoalan kesenjangan lebih utama dari pada sekedar pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga dengan hasil temuan Chisom Stephannie Adinde yang mengungkapkan arah hubungan ketimpangan pendapatan dan PDRB di Negeria. Hasil yang diperoleh bahwa Pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah penentu terhadap ketimpangan pendapatan (Adinde,

2017). Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB merupakan salah satu faktor penentu dari ketimpangan pendapatan. Begitu juga dengan Dalia Hakura dkk menemukan bahwa ketimpangan pendapatan dan gender berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDR perkapita dengan studi kasus Sub-Saharan Africa (Hakura, 2016). Meski Dalia menambahkan gender sebagai satu variabel bersama kesenjangan, namun berhasil membuktikan bahwa kesenjangan memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB perkapita. Artinya, semakin rendah rasio kesenjangan akan mengakibatkan PDRB perkapita semakin meningkat. Sehingga untuk meningkatkan PDRB perkapita dapat dilakukan dengan usaha mengurangi jurang kesenjangan baik antar penduduk, kelompok penduduk dan antarwilayah.

Temuan tersebut memperkuat temuan Hasil penelitian OECD bahwa ketika ketimpangan pendapatan meningkat pertumbuhan ekonomi akan jatuh dengan memasukkan variabel pendidikan sebagai bagian dari faktor penyebab ketimpangan (OECD, 2014). Federico Cingano dari salah satu hasil temuannya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan berkelanjutan dengan studi kasus pada negara-negara OECD selama 30 tahun (Cingano, 2014). Dua hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD tersebut memberikan bukti bahwa kesenjangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasio kesenjangan akan mengakibatkan semakin terperosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hasil temuan penelitian ini telah membuktikan bahwa penurunan rasio kesenjangan dapat meningkatkan PDRB perkapita. Temuan ini mendukung dan memperkuat beberapa temuan sebelumnya. Penurunan rasio kesenjangan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi telah melibatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam pembangunan. Pembangunan dengan tujuan menurungkan rasio kesenjangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, tujuan serta hasil pembahasan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas dapat disimpulkan sebagai berikut; Penurunan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Penurunan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto perkapita dikatakan berkualitas ketika peningkatan itu menyertakan masyarakat miskin. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin dengan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dapat menurunkan angka kesenjangan. Konsep ekonomi Islam mengutamakan penyelesaian masalah kemiskinan dan kesenjangan ketimbang pertumbuhan ekonomi. Mereduksi kemiskinan dan kesenjangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

5.2. Rekomendasi

Selanjutnya, dari hasil penelitian ini dalam bentuk hubungan antar variabel, maka dapat dijelaskan implikasi dari hasil penelitian tersebut terhadap pembangunan ekonomi dalam rangka menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut; Berdasarkan hasil pengukuran kekuatan pengaruh penurunan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan memiliki implikasi yang cukup terhadap peningkatan PDRB perkapita. Untuk itu dalam rangka membantu mempercepat proses peningkatan PDRB perkapita, dengan penurunan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan penyelesaian persoalan kemiskinan dan kesenjangan.

Referensi

- Adinde, Chisom Stephannie., " The Impac of Income Inequality On Economic Growth: A Case Study on Nigeria. (2017).
- Andiny, Puti dan Pipit Mandasari, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh", JENSI 1, no. 2 (2017).
- An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif – Perspektif Islam, (dalam Husain Matla, 2006).
- Arsyad, Lincoln, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, edisi 2, (Yogyakarta; BPFE, 2011).
- Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. *A Dictionary of Economics*. (Inggris: Penguin Books Ltd. 2004.)
- Barika, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009", *Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*", 04, no. 08 (2012).
- BPS, "Kemiskinan dan Ketimpangan", <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan>. (januari 2020)
- Cingano, Federico., "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth", OECD Publishing 2, Paris (2014).
- Creswell, John W., J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, California; SAGE Publications Ltd, 2018.
- De Silva, M.M.G.T., Akiyuki Kawasaki., "Socioeconomic Vulnerability to Disaster Risk: A Case Study of Flood and Drought Impact in a Rural Sri Lankan Community", *Ecological Economic Journal*, 152 (2018).
- Ginting, Ari Mulianta, Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013", *Kajian* 20, no. 1(2015).
- Guiga, Housseima. and Jaleddie Ben Rejeb, Poverty, Growth and Inequality in Developing Countries, *International Journal of Economics and Financial Issue* 2, no. 4 (2012)
- Hakura, Dalia., dkk., "Inequality, Gender Gaps and Economic Growth: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa", *IMF Working Paper* 16, no. 111 (2016).
- Hindun, Ady Soejoto, Hariyati., "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 8, no. 3 (2019), h. 250-265.
- Jinghan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2014).

- Kuncoro, Mudrajat., *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN; Yogyakarta, 2010.
- Leavy, Patricia., *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*, (New York: The Guilford Press, 2017)
- Mahyudi, Akhmad., *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2004).
- Mardimin, Yohanes. *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 1996, h. 20.
- Maxmanroe, "Pertanian Pembangunan Ekonomi", <https://www.maxmanroe.com/pengertian-pembangunan-ekonomi.html>. (30 Januari 2019).
- Neuman, W. Lawrence., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, edisi 7 (United States of America: PEARSON, 2014)
- Novriansyah, Moh. Arif, "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo", *Gorontalo Development Review* 1, no.1 (2018).
- Nurkse, Ragnar. Dalam Kuncoro Mudrajat, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN; 2010).
- OECD, "Focus on Inequality and Growth", OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, Desember 2014.
- Pangkiro, Henny A.K., Debby Ch. Rotinsulu, dan Patrick Wauran, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara*, *Efisiensi* 16, no. 01 (2016).
- Pratama, AA Gede Krisna, Ida Bagus Darsana, "Pengaruh Kemiskinan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat", *E-Jurnal EP Unud* 8, no.6 (2019).
- Putri, Yosi Eka, dkk., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia",
- Rosyidi, Suherman., *"Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro"*, Ed. Revisi., Cet. 12, (Jakarta; Rajawali Pers, 2017).
- Sasana, Hadi, "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009).
- Sjafrizal., *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. (Padang: Baduosa Media, 2008).
- Stevens, Lonnie K., dan David N. Sessions, "The Relationship Between Poverty, Economic Growth, and Inequality Revisited", *Journal of Income Distribution*, (<https://www.researchgate.net/publication/39730431>, ; 2015).
- Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)"*, (Bandung, Alfabeta: 2018).
- Suliyanto, *"Metode Riset Bisnis"*, (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Syawie, Mochamad, "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial", *Informasi* 16, no.03 (2011).
- Tim Reality, *"Kamus Terbaru Bahasa Indonesia"*, (Srabaya; Reality Publisher, 2008).
- Todaro, Michael P., "Economics Development", edisi 12, (New York; Pearson, 2014).
- Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000).
- Warda, Nila. dkk, "Kertas Kerja Smeru: Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa", Jakarta, The SMERU Research Institute: 2019.

Widarjono, Agus., *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua, (Yogyakarta; Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia, 2007).

Widarjono, dalam Iqbal, Muhammad., Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”, <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/>, 2015; (November 2019).